



E-ISSN
2962-4169
Volume 4
Nomor 1
Juni 2025

KONTEKSTUAL
Jurnal Ilmu Komunikasi
www.ubl.ac.id/kontekstual

Sosialisasi E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pringsewu

Socialization of E-Voting in the Village Head Election in Pringsewu Regency

Hariz A'Rifa'i¹, Darra Ananda², Nanang Trenggono³, Andy Corry Wardhani⁴

^{1,2,3,4}Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Bandar Lampung
Penulis korespondensi: Telpon. +62-858-4145-7044; e-mail: harizarifai@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Pringsewu berhasil melaksanakan pemilihan kepala pekon secara E-Voting di 19 pekon dengan sukses dan tanpa sengketa hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana kegiatan sosialisasi E-Voting dengan kekurangan dan kelebihan serta mengidentifikasi bagaimana pola penyampaian pesan yang terbentuk dalam sosialisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teoretis difusi inovasi, dengan hasil yang mengungkapkan tahapan, proses, saluran komunikasi, dan peran dimensi waktu dalam sosialisasi E-Voting. Penelitian ini menggambarkan proses sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu, melibatkan tahapan persiapan awal, komunikasi intensif, dan adaptasi masyarakat. Tahap awal mencakup strategi sosialisasi menggunakan video tutorial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi E-Voting sebagai langkah menuju efisiensi dalam pemilihan kepala pekon. Proses sosialisasi didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, pengurus masjid, dan pemerintahan desa, memastikan penerimaan inovasi tanpa melanggar nilai-nilai sosial dan budaya. Saluran komunikasi melibatkan media resmi pemerintah dan sosial, serta pertemuan langsung di tempat-tempat strategis seperti masjid dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimensi waktu memainkan peran penting, dengan persiapan inovasi dimulai sejak 2019 dan sosialisasi teknis intensif setelah regulasi diterbitkan pada tahun 2022. Analisis juga mengidentifikasi hambatan-hambatan, termasuk kurangnya keterampilan SDM, keterbatasan waktu, masalah EKTP, dan kesulitan orang lanjut usia. Kesimpulannya, kesuksesan implementasi inovasi bergantung pada kesiapan SDM, manajemen waktu, pemeliharaan teknis, dan pendekatan khusus terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Kata kunci: Pola Komunikasi, Sosialisasi E-Voting

Abstract

The Pringsewu Regency successfully conducted the E-Voting system for the election of village heads in 19 villages, achieving success without any disputes over the results. This research adopts a qualitative approach with the theoretical framework of innovation diffusion, revealing stages, processes, communication channels, and the role of time

dimensions in E-Voting socialization. The study illustrates the process of E-Voting socialization in the election of village heads in Pringsewu Regency, involving initial preparation stages, intensive communication, and community adaptation. The initial stage includes socialization strategies using video tutorials to enhance the community's understanding of E-Voting innovation as a step towards efficiency in electing village heads. The socialization process is supported by community figures, including religious leaders, mosque administrators, and village government officials, ensuring the innovation's acceptance without violating social and cultural values. Communication channels involve official government and social media, as well as direct meetings in strategic locations such as mosques and Polling Stations (TPS). The time dimension plays a crucial role, with innovation preparations starting in 2019 and intensive technical socialization after regulations were issued in 2022. The analysis also identifies obstacles, including a lack of human resource skills, time limitations, E-KTP issues, and difficulties faced by the elderly.

Keywords: *Communication patterns, E-Voting Socialization*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika pemerintahan tingkat desa. Kepala Desa tidak hanya merupakan figur pemimpin lokal, tetapi juga menjadi perwakilan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk desa. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan legitimasi proses pemilihan kepala desa menjadi faktor penentu dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun tujuan dari pemilihan kepala desa adalah untuk menciptakan kepemimpinan yang mewakili keinginan mayoritas masyarakat, seringkali proses tersebut diwarnai oleh sejumlah tantangan yang dapat mengganggu kelancaran dan keadilan. Beberapa tantangan tersebut melibatkan masalah dalam proses pemilihan, potensi kecurangan, intimidasi, dan pelanggaran etika dalam arena politik desa. Tantangan dalam proses pemilihan kepala desa sering kali berujung pada munculnya sengketa hasil. Sengketa ini dapat timbul karena ketidakpuasan terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak adil, adanya pelanggaran etika selama masa kampanye, atau dugaan kecurangan dalam perhitungan suara.

Era digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan kepemimpinan. Salah satu implementasi dari e-government adalah penerapan teknologi digital dalam pemungutan suara yang dikenal sebagai *electronic voting* (E-Voting). E-Voting merupakan metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan menggunakan teknologi elektronik. Menurut *The Council of Europe* (CoE), E-Voting adalah perangkat pemberian suara secara elektronik yang memiliki potensi untuk mempercepat tabulasi data, mengurangi biaya pemilihan, dan mencegah pemilih yang tidak berhak. Penggunaan E-Voting pertama kali dicatat pada pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 1964 dengan menggunakan sistem kartu berlubang (*punched card system*) (Risnanto, 2017).

Penerapan E-Voting di Indonesia sebagai salah satu metode pemungutan suara, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.147/PUU-VII/2009, telah membuka

Hariz A'Rifa'i, Darra Ananda, Nanang Trenggono, Andy Corry W.

peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan kepala desa. Implementasi pertama E-Voting di Indonesia terjadi pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tahun 2009. Keputusan ini memberikan beberapa keuntungan, termasuk efisiensi waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta potensi untuk mengurangi konflik pasca-pemilihan. Namun, E-Voting juga dihadapi oleh sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah kehilangan hak pilih oleh warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Selain itu, kendala dalam memfasilitasi pemilih dengan kebutuhan khusus, seperti tunanetra, juga menjadi isu yang perlu diatasi (Ihksan Darmawan dkk, 2014).

Pada tahun 2022, Kabupaten Pringsewu menjadi pionir dengan menerapkan metode E-Voting dalam pemilihan kepala pekon (Pilkakon) di 19 pekon secara serentak. Inovasi ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Provinsi Lampung dan pertama di Indonesia yang menggunakan E-KTP sebagai kartu identitas pemilih sekaligus kartu tapping mesin pemilihan. Pelaksanaan pemilihan E-Voting ini terbilang berhasil tanpa adanya sengketa hasil, sehingga 19 Kepala Pekon terpilih dapat dilantik. Sosialisasi E-Voting oleh panitia pemilihan kepala pekon memiliki peran krusial dalam memastikan suksesnya proses demokrasi tingkat pekon. Sosialisasi oleh panitia pemilihan kepala pekon perlu memfokuskan pada prosedur dan tata cara pemilihan kepala desa agar semua warga desa memahami langkah-langkah yang harus diikuti, terutama karena ini adalah kali pertama sistem E-Voting digunakan. Informasi tentang kriteria calon, persyaratan pencalonan, serta hak dan kewajiban pemilih juga perlu disampaikan secara jelas. Selain itu, penting untuk menyosialisasikan jadwal pelaksanaan pemilihan agar warga dapat mengatur waktu dan partisipasi mereka secara optimal.

Dalam konteks komunikasi politik, sosialisasi program E-Voting menjadi suatu fungsi komunikasi persuasif. Sosialisasi ini berperan memberitahukan atau menerangkan muatan persuasif terkait metode pemilihan baru ini. Sosialisasi oleh penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam membentuk pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap inovasi ini. Komunikasi politik dalam konteks ini merupakan proses penyampaian pesan politik yang terjadi saat fungsi-fungsi lainnya dijalankan, termasuk sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan (Rush dan Althoff, 1997). Dalam konteks sosialisasi E-Voting, pemahaman terhadap pola penyampaian pesan menjadi krusial. Terutama, mengingat bahwa penyebaran informasi pada pemilihan Kepala Pekon melibatkan penggunaan teknologi digital, yang merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat pekon. Sebagaimana disoroti oleh Safitri dan rekan-rekan (2019), proses komunikasi dalam konteks ini dapat dianggap setara dengan proses difusi. Penerapan prinsip difusi inovasi menjadi kunci, di mana penyampaian pesan tidak hanya berperan sebagai alat informasi, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan pandangan audiens terhadap inovasi yang diperkenalkan.

Melihat kesuksesan Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Kepala Pekon melalui metode E-Voting, penting untuk diakui bahwa proses sosialisasi menjadi faktor krusial yang berdampak signifikan pada kelancaran dan hasil pemilihan tersebut. Mengingat

dinamika yang muncul dan kompleksitasnya situasi, penelitian ini tertarik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan proses sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu. Dalam upaya ini, penelitian akan mengadopsi teori difusi inovasi sebagai kerangka konseptual, memberikan landasan yang kuat untuk menyelidiki aspek-aspek sosialisasi yang memainkan peran penting dalam penerimaan dan implementasi metode E-Voting tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan dan pola komunikasi mengenai sosialisasi *e-voting* pada pemilihan kepala desa di kabupaten Pringsewu dengan menggunakan teori difusi inovasi sebagai kerangka kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti dengan menggambarkan proses sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu, melibatkan tahapan persiapan awal, komunikasi intensif, dan adaptasi masyarakat. Tahap awal mencakup strategi sosialisasi menggunakan video tutorial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi E-Voting sebagai langkah menuju efisiensi dalam pemilihan kepala pekon. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara intensif dengan 5 informan yang merupakan Pejabat Dinas PMP Kabupaten Pringsewu dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Masyarakat Pemilih. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis melalui reduksi data, penyajian, kemudian disimpulkan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada latar belakang inovasi pemilihan kepala pekon E-Voting, terdapat penjelasan mengenai sejarah dan persiapan awal penggunaan E-Voting di Kabupaten Pringsewu. Program E-Voting telah dipersiapkan sejak tahun 2019, dengan pembuatan regulasi yang melibatkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Penggunaan E-Voting juga dipicu oleh adanya program smart city yang mencakup fitur E-Voting, dan uji coba pertama dilaksanakan di Pringsewu. Dalam konteks sosial, penggunaan E-Voting bertujuan untuk meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala pekon. Selain itu, ada upaya untuk mengurangi perjudian yang terkait dengan pemilihan dan menghilangkan gugatan yang sering muncul dalam pemilihan konvensional.

Cara kerja pemilihan kepala pekon E-Voting dijelaskan dengan rinci. Mekanisme pelaksanaannya hampir mirip dengan pemilihan konvensional, dengan perbedaan bahwa E-Voting dibantu oleh mesin pemilihan. Proses dimulai dengan pendataan pemilih (DPS RT) yang berkunjung ke rumah warga untuk meminta KTP Elektronik. KTP ini kemudian diinput ke mesin tapping, yang memiliki chip. Apabila ada warga yang belum memiliki KTP atau KTP yang tidak dapat terkoneksi dengan mesin, perekaman dan pembuatan KTP baru dilakukan. Setelah proses perekaman chip KTP selesai, panitia pemilihan melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada hari pemilihan, pemilih diarahkan untuk mendaftar dengan menge-tapping mesin pendaftaran, selanjutnya ke mesin pemilihan untuk memilih ("tutul"), dan terakhir, melakukan foto selfie di mesin.

Hariz A'Rifa'i, Darra Ananda, Nanang Trenggono, Andy Corry W.

Dalam kutipan yang diambil dari narasumber, Aziz Mahendra, seorang anggota panitia E-Voting, menggarisbawahi bahwa E-Voting membuat proses pemilihan menjadi lebih cepat, efisien, dan sederhana, dengan pemilih hanya perlu beberapa langkah singkat untuk selesai melakukan pemilihan.

“Pokoknya Kalo evoting ini kita lebih efisien, lebih cepat enggak kayak dulu. Ribet banget lah kita harus datang, kita nunggu lama antri gitu kan? Kalo sekarangi kita bisa langsung datang tapping KTP trus kita milih tutul-tutul bahasanya layar sentuh, foto selfie terus keluar udah. sangat simpel, satu menit pun selesai.” (Aziz Mahendra, Panitia E-Voting Pekon Wonodadi, 30 Mei 2023)

Sedangkan menurut informan 4 dalam proses pemilihan menggunakan e-voting ini menimbulkan tingkat partisipasi warga yang cukup tinggi.

“... Tingkat partisipasi termasuk tinggi hampir mencapai 1500 pemilih, kalau pilihan-pilihan yang lain tentunya kalau DPT 1500 paling hanya 800 yang menggunakan hak pilihnya, hampir separuhnya atau berkisar 60% tapi kalau kemarin Termasuk tinggi ada diatas 80 % jadi hampir semua ikut.” (Sugeng Kurniadi, Aparatur Pekon Keputran, 30 Mei 2023)

Hasil analisis mengenai latar belakang inovasi E-Voting dan cara kerja pemilihan kepala pekon E-Voting berdasarkan teori difusi inovasi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi E-Voting dalam pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu dan bagaimana inovasi ini berdampak pada efisiensi dan pengurangan masalah yang terkait dengan pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas ditemukan bahwa strategi sosialisasi pemilihan kepala pekon secara E-Voting dilakukan dengan beberapa langkah, sebagai berikut :

1. Pemberitahuan Tahun Sebelumnya dan Pembentukan Tim Sosialisasi: Sosialisasi dimulai sekitar satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala pekon E-Voting. Pihak terkait, seperti Camat dan Desa, diberitahu tentang penggunaan E-Voting pada pilkakon tahun depan. Regulasi terkait E-Voting diterbitkan pada bulan Februari, dan video tutorial pertama kali dibuat pada bulan Februari 2022. Tim sosialisasi dan dibentuk kemudian bekerja membuat video simulasi dan sosialisasi teknis village, terbentuk tim teknis sejumlah 98 orang untuk 98 tps yang tersebar di 19 pekon dengan klasifikasi utama menguasai IT.
2. Sosialisasi Secara Manual dan Video Tutorial: Sosialisasi dilakukan melalui dua metode utama, yaitu secara manual dan melalui video tutorial. Proses pemilihan E-Voting, termasuk tahapan dari KPPS yang menggunakan KTP pemilik pertama, disampaikan melalui video tutorial. Panitia pemilihan menyebarkan video ini kepada mata pilih untuk dilihat. Informasi juga disampaikan secara manual.
3. Pemanfaatan Media Milik Pemerintah: Media milik pemerintah, seperti website

- resmi pekon dan grup WhatsApp (WA), digunakan untuk menyebarkan informasi tentang E-Voting. Informasi ini dapat lebih cepat menjangkau stakeholders terkait, dan link-link info disebarakan melalui WA.
4. Simulasi Langsung di Lapangan: Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, simulasi langsung dilakukan di lapangan. Sejumlah simulasi diadakan di berbagai desa, dihadiri oleh perwakilan dari Dinas, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten. Simulasi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana proses pemilihan E- Voting berlangsung secara praktis.
 5. Safari Ramadhan dan Sosialisasi di Masjid dan Sekolah: Pada saat bulan Ramadhan, panitia pemilihan memanfaatkan momen safari Ramadhan untuk memberitahu masyarakat tentang E-Voting. Mereka berkunjung ke masjid dan sekolah untuk memberikan informasi kepada warga bahwa pilkakon tahun ini akan menggunakan sistem E-Voting. Petugas panitia juga menjelaskan bahwa KTP dapat digunakan untuk daftar tapping di sistem E- Voting.
 6. Banner Informasi di Balai Desa dan Tempat Publik: Informasi tentang E- Voting juga disebarakan melalui pemasangan banner di Balai Desa dan lokasi publik lainnya. Ini membantu memastikan bahwa pesan tentang E-Voting sampai ke masyarakat setempat.
 7. Sosialisasi Langsung ke Masyarakat melalui Panitia TPS: Panitia sekretariat membentuk panitia TPS yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi langsung kepada warga yang berada di TPS masing-masing. Mereka menyusun jadwal sosialisasi di berbagai TPS dan mengundang masyarakat untuk hadir. Selain itu, informasi juga diposting di website pekon, yang terhubung dengan Facebook, untuk menjangkau lebih banyak orang.
 8. Sosialisasi melalui WhatsApp (WA): Informasi juga disebarakan melalui WhatsApp. Link-link informasi dikirim melalui WA kepada kontak-kontak penting, termasuk kontak kades dan panitia lainnya. Ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif di tingkat masyarakat setempat.
 9. Tanggapan Positif dari Masyarakat: Masyarakat merespons positif terhadap informasi yang mereka terima. Mereka menyoroti kecepatan, efisiensi, dan kesederhanaan sistem E-Voting dibandingkan dengan pemilihan konvensional menggunakan surat dan kotak suara, serta menyadari manfaatnya dalam menghemat waktu.

Dengan berbagai strategi sosialisasi ini, pemerintah setempat dan panitia pemilihan telah berhasil memastikan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala pekon E-Voting di Kabupaten Pringsewu. Ini mencerminkan upaya yang serius untuk memperkenalkan inovasi ini dan memastikan kesuksesannya.

1. Pembahasan

Sosialisasi pada pemilihan kepala pekon di kabupaten pringsewu bukan hanya berkaitan dengan informasi umum yang berulang kali di sampaikan pada setiap pemilihan kepala pekon, dikarenakan dengan diadopsinya metode e-voting sosialisasi juga berkaitan dengan bagaimana e-voting sebagai sebuah inovasi dapat diterima. Penting karenanya

penyampaian pesan yang disampaikan dapat terdistribusi melalui saluran dan metode yang baik agar menghasilkan pemahaman yang optimal pada masyarakat pemilih. Menurut Rogers (1983), proses penyebaran inovasi terdiri dari tiga elemen kunci, yaitu Tahap Awal, Proses, dan Konsekuensi. Berikut adalah pembahasan tentang bagaimana proses penyampaian pesan yang dilihat dari teori difusi inovasi pada pemilihan kepala pekon E-Voting di Kabupaten Pringsewu.

a. Tahap Awal

Tahap awal dalam difusi inovasi mencakup penerimaan awal terhadap ide atau gagasan inovasi. Dalam kasus pemilihan kepala pekon E-Voting di Kabupaten Pringsewu, faktor-faktor yang memengaruhi tahap awal penerimaan ide inovasi melibatkan kepribadian penerima, wawasan sosial yang lebih luas (cosmopolitanism), dan kebutuhan untuk memiliki inovasi baru tersebut. (Rogers, 1995). Terdapat berbagai macam kepribadian penerima informasi yang memengaruhi cara individu atau kelompok merespons dan mengadopsi inovasi atau informasi baru seperti e-voting. Dalam hal ini penerima informasi inovasi e-voting sendiri adalah masyarakat yang berada dalam daerah pemilihan, baik yang bertindak sebagai aparatur maupun yang hanya sebagai pemilih. Seperti pada masyarakat pedesaan pada umumnya, masyarakat pekon yang ada di kabupaten pringsewu memiliki kepatuhan terhadap aparatur desa dan tokoh masyarakat setempat, sehingga keputusan yang diambil para *opinion leaders* tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat setempat. Pekon di kabupaten pringsewu juga dikenal sebagai pekon yang cukup mapan menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan, sehingga masyarakatnya cenderung terbuka pula dengan adanya inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi pada pemilihan kepala pekon. Selain itu dengan kondisi pemilihan konvensional yang dianggap penuh celah untuk melakukan kecurangan ada pihak-pihak yang memanfaatkannya, selain untuk kemenangan calon juga kemenangan dalam perjudian. Terakhir pada pemilihan kepala pekon menggunakan metode konvensional ditemukan beberapa gugatan baik pada proses pelaksanaan sampai dengan hasil perhitungan suara oleh calon yang kalah. Sementara itu sistem e-voting menawarkan pelaksanaan yang efisien secara biaya dan waktu, juga keamanan pada sistem pelaksanaan pemilihan dan perhitungan hasil suara.

b. Proses

Tahap proses dalam difusi inovasi melibatkan penentuan apakah individu atau kelompok akan menerima atau memiliki inovasi tersebut. Ini didukung oleh pengetahuan tentang inovasi dan penilaian terhadap nilai-nilai sistem sosial yang ada. Penting bahwa inovasi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sehingga mereka dapat menerima perubahan dan beradaptasi dengan inovasi tersebut. Pada tahap ini, Dinas PMP Kabupaten Pringsewu mengambil langkah-langkah penting dalam menjalankan strategi sosialisasi. Mereka menggunakan video tutorial sebagai salah satu alat sosialisasi untuk membuka wawasan masyarakat terhadap inovasi E-Voting. Masyarakat

diinformasikan tentang keefektifan dan efisiensi sistem E-Voting dibandingkan dengan pemilihan manual. Ini adalah langkah penting karena pemilihan E-Voting pertama kali diterapkan di Provinsi Lampung, membuatnya menjadi inovasi yang cukup baru. Penggunaan KTP elektronik sebagai ID pemilih juga merupakan kebaruan di Indonesia. Menurut sekretaris Dinas PMP Kabupaten Pringsewu, inovasi ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung untuk mengembangkan Provinsi Lampung menjadi smart city.

Hal diatas dapat dimaknai sebagai komunikasi persuasif, dimana komunikasi persuasi berkaitan dengan upaya meyakinkan orang lain untuk menerima ide atau pandangan tertentu (Effendy, 2009). Dalam konteks strategi sosialisasi Dinas PMP Kabupaten Pringsewu, upaya mereka untuk meyakinkan masyarakat tentang manfaat E-Voting dan penggunaan KTP elektronik dapat dilihat sebagai upaya persuasif. Dalam penyebaran inovasi sistem E-Voting, pemerintah Kabupaten Pringsewu bermitra dengan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, pengurus masjid, dan pemerintahan desa setempat. Mereka bekerja sama dengan tingkat RT sampai kepada Kepala Pekon untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem ini tidak melanggar nilai-nilai pemilihan yang ada sebelumnya. Komunikasi ini sejalan dengan Teori Efek Pemimpin di mana individu-individu tertentu dalam kelompok atau masyarakat memiliki pengaruh dan kepercayaan lebih dari anggota lainnya (Ardianto, 2014) . Dalam kebudayaan masyarakat kabupaten pringsewu yang mayoritas beragama islam dan bersuku jawa, ketokohan seorang ulama/kiyai kampung ditempatkan sebagai salah satu rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber pengetahuan. Selain itu dalam urusan kesehariannya, masyarakat sering menggantungkan informasi dan keputusan pada pamong, tokoh masyarakat atau aparatur pekon, sehingga apa-apa yang disampaikan dalam sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat akan punya peluang lebih mudah diterima dan dimengerti.

c. Konsekuensi

Pada tahap konsekuensi dalam proses difusi inovasi, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu diterima dan dilanjutkan atau ditolak, (Rogers, 1995). Dalam kasus pemilihan kepala pekon E-Voting di Kabupaten Pringsewu, akhirnya inovasi ini diterima dan diimplementasikan. Salah satu alasan kuat mengapa inovasi E-Voting ini diterima adalah efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkannya. Pemilihan kepala pekon sebelumnya seringkali memakan waktu hingga larut malam atau bahkan dini hari saat penghitungan suara. Sistem E-Voting dianggap sebagai solusi yang lebih efisien dalam hal ini, meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk proses pemilihan. Selain itu, sistem ini juga dianggap dapat mengurangi peluang untuk perilaku negatif seperti perjudian yang sering terjadi dalam pemilihan kepala pekon sebelumnya. Meskipun inovasi ini diterima secara umum, tidak dapat dihindari bahwa masih ada kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelaksanaannya. Beberapa di antaranya mencakup masalah teknis, seperti kendala teknis pada peralatan di beberapa lokasi yang mengalami error. Selain itu, penting untuk memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompeten dalam pelaksanaan sistem E-Voting. SDM

yang lebih mumpuni akan menjadi kunci untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul di lapangan.

Dalam kesimpulan, meskipun ada tantangan teknis dan perlu perbaikan dalam implementasi, inovasi pemilihan kepala pekon E-Voting di Kabupaten Pringsewu telah diterima dengan baik oleh masyarakat karena efisiensi waktu dan biaya yang dihadapkannya. Kritik-kritik tersebut juga dapat digunakan sebagai masukan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem ini agar menjadi lebih baik di masa depan. Dengan demikian, pemilihan kepala pekon E-Voting menjadi contoh yang sukses dalam mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi lokal.

d. Kelebihan dan Kekurangan Sosialisasi Kelebihan

Sosialisasi yang dilaksanakan berjalan dengan mendalam dan masif sehingga memiliki keunggulan yang signifikan dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait suatu hal, terutama dalam konteks pemilihan umum. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah melakukan sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah. Melalui pemungutan E-KTP oleh RT, informasi dan edukasi dapat disampaikan dengan lebih personal dan mendalam kepada setiap individu di tingkat masyarakat yang lebih mikro. Metode ini membuka ruang untuk dialog interaktif antara penyelenggara pemilihan dan warga, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih rinci dan jawaban langsung terhadap pertanyaan atau keraguan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan ini membangun kepercayaan karena menunjukkan komitmen penuh terhadap penyampaian informasi yang benar dan akurat, serta memastikan bahwa setiap warga memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.

Proses sosialisasi diatas dapat sebagai komunikasi persuasif, sebuah proses komunikasi yang fokus pada upaya untuk memengaruhi atau meyakinkan audiens melalui komunikasi (Perloff, 2017). Aspek yang dapat kita kaji yang pertama adalah personalisasi pesan, Melalui sosialisasi langsung dari rumah ke rumah, penyelenggara pemilihan dapat memberikan informasi secara lebih personal kepada masyarakat. Penggunaan E-KTP oleh RT menciptakan kesempatan untuk memberikan pesan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan individu. Personalisasi pesan adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi persuasif. Dengan menyajikan informasi secara personal, pesan menjadi lebih dapat diterima dan membangun koneksi emosional dengan audiens.

Selanjutnya dapat kita temui aspek Pembangunan Kepercayaan dan Kredibilitas, Sosialisasi langsung menunjukkan komitmen penuh terhadap penyampaian informasi yang benar dan akurat. Melibatkan warga secara langsung melalui pemungutan E-KTP oleh RT dapat membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Kepercayaan dan kredibilitas pemancar pesan adalah unsur kunci dalam persuasi. Dengan menunjukkan komitmen dan integritas dalam penyampaian informasi, penyelenggara pemilihan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Sosialisasi yang dilakukan terkait dengan implementasi sistem e-voting di kabupaten pringsewu juga terdapat beberapa kekurangan,

- a. Penetapan waktu sosialisasi terlalu singkat, sudah semestinya waktu menjadi faktor krusial yang dalam proses sosialisasi. Penyebaran inovasi memerlukan waktu yang cukup untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penerimaan dari masyarakat. Ketika waktu terbatas, pesan-pesan sosialisasi mungkin tidak dapat disampaikan dengan efektif, dan kesempatan untuk merespon pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat bisa terbatas.
- b. Karena keterbatasan waktu yang disediakan maka Dinas PMP Kabupaten Pringsewu tidak memiliki waktu yang optimal dalam menyiapkan dan mengedukasi panitia penyelenggara, hal tersebut berdampak pada ketersediaan panitia dengan pemahaman yang memadai di setiap pekon dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam mengoperasikan sistem e-voting.
- c. Tidak adanya strategi khusus dalam mensosialisasikan pemilihan e-voting pada kalangan lanjut usia. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi khusus dan bantuan yang lebih untuk membantu mereka mengikuti proses inovasi. Pemberian panduan secara langsung, pelatihan khusus, dan pendekatan yang ramah lansia dapat membantu mengatasi hambatan ini, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari e-voting tanpa ada yang tertinggal.

Pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi keurangan ini tidak dapat diabaikan dalam konteks sosialisasi e-voting. Dengan mengadopsi strategi yang memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin muncul, pihak penyelenggara dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dengan percaya diri dan memahami dalam proses pemilihan umum yang modern.

Dalam rangka memahami secara lebih mendalam proses sosialisasi e-voting, terdapat tiga tahap yang dilibatkan hingga mencapai masyarakat pemilih. Pada tahap pertama, Dinas PMP Kabupaten Pringsewu memegang peran sebagai komunikator utama yang mengorganisir dan menyampaikan sosialisasi. Sosialisasi ini dirancang untuk menyampaikan kebijakan inovasi e-voting dan aspek teknis pemilihan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan, pekon, Badan Himpun Pekon, dan Panitia yang telah dibentuk. Sosialisasi dilaksanakan secara formal dalam agenda resmi pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dengan mengundang peserta ke kantor Dinas PMP Kabupaten Pringsewu, dilengkapi dengan sesi simulasi.

Pada tahap kedua, sosialisasi dilakukan oleh Aparatur Pekon dan Panitia kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, dengan tujuan menciptakan kolaborasi dalam penyebaran inovasi e-voting. Tahap ini diimplementasikan melalui pertemuan informal di balai pekon dan kunjungan ke rumah-rumah para tokoh. Pesan yang disampaikan mencakup pemahaman tentang sistem pemilihan e-voting, aspek teknis pemilihan, dan pembangunan kepercayaan publik.

Tahap terakhir dalam proses sosialisasi melibatkan langsung para panitia dan tokoh masyarakat yang telah berkolaborasi dalam menjangkau masyarakat di 19 pekon yang akan

mengikuti pemilihan. Untuk mencapai sebanyak mungkin masyarakat pemilih, panitia menggunakan strategi sosialisasi massal dan persuasif. Sosialisasi massal dilakukan melalui media baliho, surat kabar, siaran radio, dan media sosial. Selain itu, sarana keagamaan dan sekolah juga dimanfaatkan, dengan sosialisasi dijalankan oleh tokoh agama dan guru sekolah. Pendekatan persuasif dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah oleh pamong atau RT, sekaligus melakukan pendataan E-KTP pemilih. Dengan kombinasi pola sosialisasi massal dan persuasif, diharapkan proses ini dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat pemilih dan berhasil mewujudkan kesuksesan inovasi pemilihan melalui e-voting.

KESIMPULAN

Proses Sosialisasi E-Voting melibatkan berbagai tahapan yang mencakup persiapan awal, komunikasi intensif, dan adaptasi oleh masyarakat, pada tahap awal, Dinas PMP Kabupaten Pringsewu mempersiapkan strategi sosialisasi dengan menggunakan video tutorial untuk membuka wawasan masyarakat tentang inovasi E-Voting. Inovasi ini dipandang sebagai langkah menuju efisiensi dan efektivitas dalam pemilihan kepala pekon. Proses sosialisasi E-Voting didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, pengurus masjid, dan pemerintahan desa. Kolaborasi dengan mereka membantu meyakinkan masyarakat bahwa E-Voting tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada sebelumnya. Dalam komunikasi, peran opinion leader diakui berperan penting dalam mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap inovasi. Saluran komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi E-Voting melibatkan media resmi pemerintah, seperti website pekon, siaran radio daerah, serta media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan langsung di tempat-tempat strategis seperti masjid dan TPS. Dimensi waktu memiliki peran penting dalam proses difusi inovasi. Persiapan inovasi E-Voting dimulai sejak 2019, dan regulasi yang mendukungnya diterbitkan pada tahun 2022. Sosialisasi teknis intensif dilakukan setelah regulasi tersebut diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistyraningsih.DP dan Wisnumurti.A, 2019. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianya, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (2): 60–64
- Ardial, 2018. *Komunikasi Studi Kasus Tentang Fungsi Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Peawai*, Medan: lembang dan penulisan ilmiah aqli, 4.
- Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Britha Mikkelsen, 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Publisher, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Changara, H. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada
- . 2013. *Perencanaan dan strategi komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Grafindo Persada. Jakarta

Crab dan Lan, 1992. *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta: CV Rajawali, hlm.68.

Darmawan dkk, 2016. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No.1, Hlm.67-84*

Effendy, O, 1986. Dimensi Dimensi Komunikasi, Bandung : Alumni

———. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 11-14.

Elvinaro Ardianto, 2014. Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014

H.A.W.Widjaja. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hermawan. A, 2012. *Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Juliman, 2017. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 6 No. 3*

Kriyantono.R, 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Morissan,MA. (2008). Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi. Jakarta: Prenada Media Group.

Mulyana, D. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya

———. 2004. *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 3.

Nurudin. 2008. Komunikasi Propaganda. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Moleong.L, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda karya, 157

Perloff, Richard M. 2017. The Dynamics of Persuasion Communication and Attitudes in The 21st Century Sixth Edition. New York: Routledge

Purwasito.A, 2002. *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Rahmat.Dj, 2005. *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 48 dan 79.

Ritzer dan George, 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Romli, Khomsahrial. 2016. KOMUNIKASI MASSA. Jakarta: PT Grasindo,

Rondonuwu, S. A. 2018. Peranan Opinion Leader dalam Menyampaikan Pesan Tentang Pembangunan Desa di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*,.

Hariz A'Rifa'i, Darra Ananda, Nanang Trenggono, Andy Corry W.

Safitri dkk, 2019. Difusi Inovasi Program Pemerintah: Studi Komunikasi Pembangunan Pada Kelompok Wanita Tani Anugrah Kabupaten Padang Pariaman, *JISPO Volume 9 No. 2. Hlm. 4-5*

Sendjaja, S. Djuarsa. 1994. Teori Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka.

Setyabudi, Djoko. 2014. Komunikasi Sosial. Banten: Universitas Terbuka.

Sudarsono.A dan Wijayanti.A, 2016. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Susanto, 1992. *Sosialisasi Pelayanan*, Malang: Universitas Kanjuruhan, hlm.163

Susanto, Astrid. 1992. Filsafat Komunikasi. Bandung:Binacipta.

Syarbaini, Syahrial. 2004. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sutaryo, 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.156

Suyanto, 2006. *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.121

Trenggono. N, 2004. Konstruksi Komunikasi Internasional. *Mediator Volume 5 No 1*

Wardhani 2002. Kontribusi Komunikasi pada Teori Pembangunan.*Mediator Volume 3 No 2*

Wulansari dan Dewi, 2009. *Sosiologi : Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm.174